

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini Jepang dikenal sebagai negara yang damai. Negara Jepang juga identik dengan masyarakatnya yang homogen. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya yang memiliki persamaan dari segi kebudayaan dan kebiasaan. Namun, hal tersebutlah yang membuat masyarakat Jepang sulit untuk menerima perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas. Sehingga kaum minoritas sering mengalami diskriminasi.

Diskriminasi merupakan faktor yang merusak kerja sama antarmanusia maupun komunikasi di antara mereka. Biasanya perlakuan diskriminatif tidak disadari oleh subjek atau orang yang menerima perlakuan diskriminasi tersebut dan oleh yang memperlakukan tindakan diskriminasi tersebut. Praktek diskriminasi merupakan tindakan pembedaan untuk mendapatkan hak dan pelayanan kepada masyarakat dengan didasarkan warna kulit, golongan, suku, etnis, agama, bangsa, jenis kelamin, dan sebagainya (Liliweri, 2005:218). Pengertian ini diperkuat oleh pendapat Theodorson & Theodorson dalam Danandjaja (2003 :2) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokrasi.

Di Jepang pada zaman Edo sendiri pemerintah mulai menerapkan sistem pelapisan kelas sosial dalam masyarakat Jepang. Sistem pelapisan kelas sosial masyarakat yang dimaksud adalah *Shinōkōshō*. *Shinōkōshō* merupakan singkatan dari, *shi* artinya bushi atau militer, *nō* artinya *nōmin* atau petani, *kō* artinya

kōsakunin atau tukang dan *shō* artinya *shōnin* atau pedagang. Di bawah kelas ini masih ada kelas terendah yang disebut *eta* dan *hinin* (Surajaya, 1993, 43). Lingkaran kelas sosial tersebut seolah menjadi pembatas yang tegas untuk membedakan kehidupan sosial terendah dengan kehidupan sosial yang tinggi, dan karena pembatasan sosial itu pula, kaum *eta* dan *hinin* sering menerima perlakuan tidak mengenakan dari masyarakat yang sering sekali mendiskriminasi mereka dengan berbagai cara.

Eta dan *Hinin* juga disamakan dengan kaum paria dan budak yang tidak dihargai harkat kemanusiaanya. Kaum *Eta* dan *Hinin* dalam masyarakat feodal Jepang adalah kaum yang menempati strata paling rendah dalam masyarakat. Kaum *Eta* dan *Hinin* sendiri sering mengalami diskriminasi dari kaum *Shinokosho*. Dikarenakan, pekerjaan kaum *eta* dan *hinin* adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor seperti misalnya menguburkan bangkai-bangkai binatang. Umumnya, pekerjaan mereka tidak disukai oleh masyarakat Jepang dikarenakan, pekerjaan tersebut dianggap tercemar karena berlainan dengan keyakinan yang dianut oleh kaum *Shinokosho* (Rosmalis, 2016).

Kelompok *eta* dan *hinin* juga tinggal terpisah dari masyarakat Jepang lainnya. Pemukiman tempat tinggal mereka dinamakan dengan *dowa chiku*. *Dowa chiku* merupakan gabungan dari beberapa *buraku*. *Buraku* adalah dusun kecil yang lebih kecil daripada desa yang didalamnya terdapat rumah-rumah kelompok *eta* dan *hinin*. Oleh karena itu, mereka disebut juga dengan *burakumin* yang berarti orang yang tinggal di *buraku*.

Diskriminasi terhadap kaum *burakumin* ini juga, awalnya disebabkan oleh masuknya agama Budha yang masuk ke Jepang. Dimana dalam ajaran budha, jika makan daging merupakan salah satu larangan karena hal yang bersangkutan dengan kematian hewan merupakan hal yang kotor. Akibatnya, siapapun yang terlibat dalam kegiatan tersebut, masuk kedalam definisi tidak murni atau harus dihindari. Hal tersebut pun menguatkan terhadap penekanan pada konteks kemurnian dan najis yang memiliki sejarah panjang dalam kepercayaan Shinto.

Pada tahun 1871, Kaum *Burakumin* sudah diperlakukan sama oleh Pemerintah yaitu dengan dihapuskannya secara resmi sistem kasta feodal. Namun hal ini tidak menghentikan diskriminasi sosial dan kondisi standar hidup mereka yang lebih rendah. Registrasi keluarga (*Koseki*) Jepang tetap mengacu kepada alamat nenek moyang sampai saat ini. Hal tersebut, memungkinkan orang untuk mengetahui keanggotaan keluarga mereka. Ini menjadikan para *burakumin* salah satu dari beberapa kelompok yang didiskriminasi dalam masyarakat Jepang. Diskriminasi kaum *Burakumin* yang timbul karena sistem registrasi keluarga (*Koseki*) ini, menyebabkan kaum *burakumin* menjadi susah untuk mencari pekerjaan maupun bergaul dengan masyarakat sekitarnya. (Wikipedia, diakses, 20 November 2017)

Pada 2 Maret 1922, *burakumin* mulai mencari kebebasan dengan kekuatan mereka sendiri dengan membuat gerakan pembebasan. Namun, setelah Jepang memasuki Perang Dunia II, tekanan militer membuat gerakan pembebasan tersebut berhenti. Hingga pada akhirnya pada 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima. 2,7 kilometer dari tempat jatuhnya bom atom, ada sekitar 6.037 populasi komunitas yang didiskriminasi. Semua rumah pada saat itu hancur dan korban pun banyak yang mengalami luka parah dan meninggal. Masyarakat dari kelas sosial tingkat atas dapat langsung pindah ke daerah lain yang lebih aman, namun tidak untuk kaum *burakumin* yang justru dipaksa untuk kembali ke daerah asal mereka. Akibatnya jumlah korban dari komunitas *burakumin* pun lebih banyak dari pada masyarakat biasa lainnya.

Setelah Perang Dunia II selesai dan Jepang sudah bangkit dari keterpurukan akibat dijatuhkannya bom atom, kaum *burakumin* sendiri pun belum dapat merasakan kemerdekaan seperti layaknya masyarakat Jepang lainnya. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial kaum *burakumin* dan kaum *burakumin* pun menjadi tersingkirkan di tengah kehidupan sosial masyarakat Jepang.

Adapun latar belakang yang menjadi alasan penulis ingin membahas tentang tindakan diskriminasi masyarakat Jepang terhadap kaum *burakumin* setelah Perang Dunia II, karena masyarakat Jepang masih menganggap jika kaum

burakumin itu sebagai kaum yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindakan diskriminasi yang diterima kaum *burakumin* dalam kehidupan sosial, pengadilan, dunia pendidikan, pekerjaan dan perkawinan. Oleh karena itu, penulis akan membahasnya dalam penelitian dengan judul **“Tindakan Diskriminasi Masyarakat Jepang Terhadap Kaum *Burakumin* Setelah Perang Dunia II”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Banyaknya kasus diskriminasi terhadap kaum *burakumin* di Jepang
2. Dampak diskriminasi terhadap kaum *burakumin*

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, maka penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Bentuk diskriminasi masyarakat Jepang terhadap kaum *burakumin* dan dampak dari diskriminasi itu sendiri terhadap kaum *burakumin*.”

1.4 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang ingin penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana bentuk diskriminasi Masyarakat Jepang terhadap kaum *burakumin* dalam kehidupan sosial, pengadilan, dunia pendidikan, pekerjaan dan perkawinan ?
2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari diskriminasi tersebut ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang penulis ingin capai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk diskriminasi Masyarakat Jepang terhadap kaum *burakumin* dalam kehidupan sosial, pengadilan, dunia pendidikan, , pekerjaan dan perkawinan.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari diskriminasi tersebut.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil dari skripsi ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak-pihak tertentu, antara lain:

- a. Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang *burakumin*.
- b. Bagi para pembaca, diharapkan dapat semakin memahami mengenai kasus diskriminasi yang diterima kaum *burakumin* di Jepang khususnya dalam kehidupan sosial, pengadilan, dunia pendidikan, pekerjaan dan perkawinan. Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian yang akan di lakukan di lain waktu.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Diskriminasi

Diskriminasi berasal dari bahasa Inggris "*Discriminate*" yang berarti membedakan. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat. Ini disebabkan karena kecendrungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, jenis kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan

dasar dari tindakan diskriminasi (Gurupendidikan A, diakses 8 Desember 2017).

Diskriminasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah diskriminasi yang terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan yang jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras dan sebagainya dan menghambat adanya peluang yang sama. Sedangkan, diskriminasi tidak langsung adalah diskriminasi yang terjadi saat peraturan bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan (Wikipedia, diakses 8 Desember 2017).

Diskriminasi menurut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) adalah termasuk perilaku, berdasarkan perbedaan dalam kategorisasi yang dibuat oleh alam atau masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya (Gurupendidikan B).

Diskriminasi menurut Liliweri (2005:218) merupakan faktor yang merusak kerja sama antarmanusia maupun komunikasi di antara mereka. Biasanya perlakuan diskriminatif tidak disadari oleh subjek atau orang yang menerima perlakuan diskriminasi tersebut dan oleh yang memperlakukan tindakan diskriminasi tersebut. Praktek diskriminasi merupakan tindakan pembedaan untuk mendapatkan hak dan pelayanan kepada masyarakat dengan didasarkan warna kulit, golongan, suku, etnis, agama, bangsa, jenis kelamin, dan sebagainya.

Diskriminasi menurut Sears, Feedman dan Peplau (1999) adalah perilaku menerima atau menolak seseorang semata-mata berdasarkan keanggotaannya berdasarkan kelompok. Misalnya banyak perusahaan yang menolak mempekerjakan karyawan dari etnik tertentu. Lalu ada organisasi yang hanya mau menerima

anggota dari etnik tertentu saja meskipun jelas-jelas organisasi itu sebagai organisasi publik yang terbuka dan umum (Psikologiku, diakses 8 Desember 2017).

Diskriminasi menurut Theodorson dan Theodorson (1972: 115-116) adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal seperti berdasarkan ras, suku bangsa, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Gurupendidikan C)

Dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan sosial lainnya (salimalfahrisy, diakses 8 Desember 2017).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa diskriminasi adalah suatu tindakan yang tidak seimbang dan merugikan dalam perorangan maupun kelompok yang didasarkan oleh perbedaan agama, suku, ras, etnik dan status sosial.

1.7.2 Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu

kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya yang saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *continue*, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki empat ciri yaitu:

1. Interaksi antar warga-warganya
2. Adat istiadat
3. Kontinuitas waktu
4. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga

(Koentjaraningrat, 2009)

Menurut Selo Seomardjan, mengatakan bahwa masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan (Pelajaran A, diakses 10 Desember 2017).

Menurut Karl Marx, mengatakan bahwa masyarakat sebagai suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis (Pelajaran B).

Menurut Max Weber, mengatakan bahwa masyarakat adalah sebagai struktur aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya (Pelajaran C).

Menurut Mack Ever, mengatakan masyarakat sebagai suatu sistem dari cara kerja dan prosedur, otoritas dan saling bantu-membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem kompleks dan selalu berubah dari relasi sosial (Pelajaran D).

Menurut Linton, mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan tertentu (Pelajaran E).

Menurut An-Nabhani, mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama, dan terjadi interaksi antara sesama karena kesamaan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan warga masyarakat (Pelajaran F).

Menurut Paul B.Horton, mengatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relative mandiri dengan bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu (Pelajaran G).

Menurut Marion Levy, terdapat empat kriteria yang perlu ada agar suatu kelompok disebut sebagai masyarakat, yaitu :

1. Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggotanya.
2. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran.
3. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada.
4. Kesetian terhadap suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama.

(Pelajaran H).

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri dengan kriteria seperti dibawah ini :

1. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
2. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antarmanusi.
3. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain.

(Pelajaran I).

Dari pendapat beberapa ahli di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam lingkungan yang sama dalam jangka waktu lama dan saling terikat satu sama lain oleh komunikasi dan kebudayaan yang dianggap sama.

1.7.3 *Burakumin*

Burakumin adalah suatu kelompok minoritas di Jepang. *Burakumin* adalah salah satu dari kelompok-kelompok minoritas utama di Jepang, selain suku Ainu dari Hokkaido, suku Ryukyu dari Okinawa dan warga Jepang keturunan Korea dan Cina (Wikipedia A, diakses 12 Desember) .

Burakumin adalah keturunan dari masyarakat terbuang pada zaman feodal, yang terutama terdiri dari orang-orang yang

pekerjaannya dianggap “tercemar” karena berhubungan dengan kematian seperti algojo, pengurus jenazah, atau penyamak kulit. Pekerjaan tersebut dianggap tercemar karena berlainan dengan keyakinan yang dianut oleh kaum *Shinokosho*. Dahulu mereka biasanya tinggal di lingkungan khusus atau dusun yang terpisah dari masyarakat umum lainnya (Wikipedia B).

Pengertian *burakumin* menurut Menton (2003:251) adalah, *burakumin* merupakan suatu kelompok minoritas sosial di Jepang. Secara fisik, mereka tidak berbeda dengan masyarakat Jepang lainnya, mereka juga menggunakan bahasa yang sama.

Menurut Gotlieb (2006:50), *burakumin* adalah kelompok minoritas terbesar di Jepang yang jumlahnya diperkirakan sekitar tiga juta jiwa. Secara fisik mereka tidak berbeda dengan masyarakat Jepang umumnya, namun yang menjadikan mereka sebagai kaum minoritas adalah pada cara hidup mereka.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa *burakumin* adalah kaum minoritas terbuang yang dikarenakan pekerjaan mereka yang dianggap tercemar dan berbeda dengan keyakinan yang dianut oleh kaum *shinokosho*.

1.8 Metode Penelitian

Dalam mencari informasi mengenai Perkembangan Kaum Burakumin di Jepang, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data kepustakaan. Sedangkan metode penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data yang penulis dapatkan, lalu menganalisis data-data tersebut dengan metode yang diperlukan untuk mencapai tujuan skripsi ini. Data-data mengenai perkembangan kaum burakumin d Jepang, penelitian-penelitian tersebut diperoleh dari jurnal dan artikel-artikel yang ada di internet.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan tugas akhir, penulis membuat sistematika dalam empat bab:

Bab I: Pendahuluan berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, landasan teori dan sistematika penelitian.

Bab II: Pemaparan tentang sejarah *burakumin* yang berisi tentang latar belakang sejarah, *burakumin* pada zaman Edo dan restorasi Meiji, sistem registrasi *koseki*, kelahiran *Suiheisha* dan *Buraku Liberation League* dan pendidikan Dowa.

Bab III: Memaparkan mengenai tindakan diskriminasi yang dilakukan masyarakat Jepang terhadap kaum *burakumin* setelah perang dunia II dalam kehidupan sosial, pengadilan, pendidikan, pekerjaan dan perkawinan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan hidup kaum *buraku*.

Bab IV: Kesimpulan.

